

Optimalisasi Pengamanan Pulau Terluar Guna Mengatasi Ancaman Kejahatan Trans Nasional Dalam Rangka Menegakkan Kedaulatan Nkri

Yana Bahtiar Mediana¹⁾

Sekolah Staf dan Komando Markas Besar Tentara Nasional Indonesia¹⁾

Abstrak

Pengamanan pulau terluar di wilayah Kodam IX/Udayana melalui pengerahan Satgas Pengamanan Pulau Terluar yang melibatkan personel gabungan TNI AD dan TNI AL belum optimal dalam menanggulangi ancaman kejahatan transnasional. Pulau Batek dan Pulau Dana Rote di Nusa Tenggara Timur menjadi wilayah operasi utama yang menghadapi berbagai ancaman seperti penyelundupan narkoba, senjata api, illegal fishing, hingga infiltrasi asing. Rendahnya kesiapan operasional Satgas disebabkan oleh kurangnya sinkronisasi langkah antara TNI AD dan TNI AL, serta minimnya pembekalan personel terkait karakteristik daerah operasi. Keterbatasan dukungan alutsista, materiil, transportasi, dan komunikasi juga menghambat efektivitas pengamanan. Selain itu, sinergitas antarinstansi terkait, termasuk dengan pemerintah daerah, masih belum optimal akibat ego sektoral, yang mengakibatkan lambatnya pertukaran informasi dan penanganan kejahatan transnasional serta infiltrasi asing. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi kebijakan guna mengoptimalkan pengamanan pulau terluar dan menegakkan kedaulatan NKRI. Metode yang digunakan adalah deskriptif-analisis dengan studi kepustakaan. Rekomendasi meliputi pembentukan tim pokja terpadu lintas matra untuk sinkronisasi operasi, modernisasi alutsista dan peralatan Satgas, serta percepatan pembangunan infrastruktur di pulau-pulau terluar. Kebijakan lintas sektoral yang melibatkan unsur TNI, Kementerian, Bakamla, Polairud, dan dinas keimigrasian juga diperlukan untuk memperkuat pengamanan pulau terluar dalam menghadapi ancaman kejahatan transnasional.

Kata Kunci: pengamanan pulau terluar, kejahatan transnasional, kedaulatan NKRI, sinergitas TNI, Kodam IX/Udayana

Abstract

The security of Indonesia's outer islands in the Kodam IX/Udayana region, through the deployment of the Outer Island Security Task Force comprising joint personnel from the Indonesian Army (TNI AD) and Navy (TNI AL), has not yet been optimal in addressing transnational crime threats. Batek Island and Dana Rote Island in East Nusa Tenggara are the primary areas of operation, facing various threats such as drug smuggling, firearms trafficking, illegal fishing, and foreign infiltration. The lack of operational readiness stems from poor coordination between TNI AD and TNI AL, as well as insufficient briefing for personnel on the characteristics of the operational area. Limited support in terms of weaponry, equipment, transportation, and communication also hampers the effectiveness of security efforts. Furthermore, the synergy between relevant agencies, including local governments, remains suboptimal due to sectoral egos, resulting in delayed information exchange and responses to transnational crime and foreign infiltration. This research aims to provide policy recommendations to optimize the security of the outer islands and uphold Indonesia's sovereignty. The research employs a descriptive-analytical method based on a literature review. Recommendations include forming an integrated task force to synchronize operations, modernizing weaponry and equipment for the task force, and accelerating infrastructure development on the outer islands. Cross-sectoral policies involving the

TNI, relevant ministries, Bakamla, Polairud, and the immigration department are also needed to strengthen the security of outer islands against transnational crime threats.

Keywords: *outer island security, transnational crime, Indonesia sovereignty, TNI synergy, Kodam IX/Udayana*

Copyright (c) 2019 Nama Penulis

¹Corresponding author : Edy Susanto

Email Address : edysusanto9952@gmail.com

Received tanggal bulan tahun, Accepted tanggal bulan tahun, Published tanggal bulan tahun

PENDAHULUAN

Wilayah kedaulatan NKRI meliputi wilayah yang tersebar dari Sabang sampai Merauke dan dari pulau Miangas sampai Pulau Rote dengan seluruh sumber daya kekayaan alam yang terkandung didalamnya dengan keseluruhan jumlah pulau sekitar 17.504 pulau dengan pulau yang berkoordinat dan bernama sejumlah 16.056 pulau. Dari keseluruhan pulau tersebut, terdapat sekitar 111 pulau kecil terluar yang tersebar diantaranya berbatasan langsung dengan negara tetangga dengan kondisi umumnya masih alami berupa pulau batu, karang dan pulau yang tidak memiliki vegetasi dengan sebagian besar tidak berpenghuni (Pemri, 2017).

Di Pulau Batek dan Pulau Dana Rote yang merupakan wilayah tanggung jawab dari Kodam IX/Udayana sendiri, dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir kerap ditemukan adanya kasus-kasus penyelundupan Narkoba, senjata dan Muhandak, dan terkait dengan ancaman terhadap kedaulatan negara, saat ini ditemukan adanya kemungkinan kemungkinan bentuk infiltrasi dengan maksud daniat yang sesungguhnya untuk menguasai wilayah NKRI melalui pulau-pulau kecil terluar dan gugusannya oleh negara lain yang dilakukan dalam bentuk asimilasi dan akulturasi melalui pernikahan warga negara asing dengan penduduk setempat. Untuk itu, diperlukan adanya Operasi Pengamanan Pulau Terluar, dimana TNI sebagai leading sektornya, antara lain dilaksanakan oleh Kodam IX/Udayana selaku Koops Pam Pulau Terluar telah membentuk Kolakops Pengamanan Pulau Terluar dibawah kendali Korem 161/WS untuk melaksanakan pengamanan Pulau-pulau Terluar yang ada di daerah tanggung jawabnya dengan sasaran tercegahnya infiltrasi yang diselubungi niat untuk menguasai pulau-pulau kecil terluar dan gugusannya oleh negara lain, tercegahnya aktifitas terorisme yang memanfaatkan pulau-pulau kecil terluar dan gugusannya, tercegahnya kegiatan kegiatan ilegal untuk dijadikan tempat *rendezvous point* (titik pertemuan) terhadap pulau-pulau kecil terluar dan gugusannya serta tegaknya kedaulatan dan terjaganya keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. (TNI, 2011).

Pengamanan yang dilaksanakan oleh Kodam IX/Udayana dilaksanakan melalui pengerahan Satgas Pengamanan Pulau Terluar yang personelnya merupakan personel gabungan dari unsur TNI AD dan Marinir TNI AL dengan tugas pokok melaksanakan operasi pengamanan Pulau Batek dan Pulau Dana Rote di wilayah Nusa Tenggara Timur, dalam rangka mendukung tugas pokok TNI.¹ (IX/Udayana,

¹ Makodam IX/Udayana. (2019). Laporan Evaluasi Pelaksanaan Operasi Pengamanan Pulau Kecil Terluar Triwulan I Ta 2019 Kodam IX/Udayana (Periode 1 Januari Sd 31 Maret 2019). Denpasar, Hal-5

2019) Operasi Pengamanan pengamanan Pulau terluar yang dilaksanakan oleh Satgas Pamantas Koops TNI Kodam IX/Udayana sebagaimana tersebut diatas pada kenyataannya belum sepenuhnya optimal dilaksanakan. Karena faktanya di lapangan masih banyak ditemukan adanya tindak kejahatan trans nasional seperti pembuangan limbah, penyelundupan Narkoba dan senjata api/Muhandak *illegal fishing*, serta Infiltrasi yang dilakukan oleh negara tetangga dengan melakukan asimilasi dan akulturasi dengan masyarakat sekitar Pulau terluar, saat ini telah dan sedang terjadi di wilayah yang berdekatan dengan kedua pulau yang menjadi tugas dan tanggung jawab Koops Dam IX/Udayana. Belum optimalnya Pengamanan Pulau Terluar tersebut disebabkan oleh adanya beberapa persoalan yang dihadapi menyangkut kesiapan operasional Pengamanan Pulau Terluar yang masih rendah, dimana personel Satgas yang merupakan gabungan dari unsur TNI AD (Kolakops Rem 161/WS) dan unsur TNI AL dari Korps Marinir belum memiliki kesamaan langkah dan tindakan dalam menerapkan pengamanan pulau terluar.

Disamping itu, pengenalan daerah operasi penugasan menyangkut karakteristik daerah operasi dari personel penugasan dari satuan marinir yang kurang karena sebelumnya tidak mendapatkan pembekalan di home base masing-masing. Untuk dukungan alutsistadan materiil serta peralatan dan kelengkapan Satgas sendiri masih terbatas, yang dapat dilihat dari sulitnya Kodal Pamputer dihadapkan dengan jarak tempuh Koops dari Denpasar menuju Pos Batek dan Pos Dana Rote, sementara alkom berupa Alkom dan HP Satelit untuk mendukung pelaksanaan Kodal yang masih sangat terbatas, serta terbatasnya sarana transportasi (laut yang digunakan untuk patroli) dan masih terjadi adanya hambatan dalam pelaksanaan dorlog yang saat ini bergantung pada kondisi cuaca menuju pulau Batek dan Dana Rote. Persoalan lainnya yaitu sinergitas pengamanan Pulau Terluar yang dilaksanakan oleh unsur TNI dengan Kementerian/Lembaga terkait dan Pemerintah Daerah termasuk unsur lainnya seperti BNPP dan BPPD, Polairud, Bakamla, Dishubla dan Dinas keimigrasian belum optimal, dimana masing-masing instansi masih mengedepankan sikap ego sektoral sehingga proses pertukaran informasi kejahatan transnasional, penanganan terorisme dan pencegahan serta monitoring kegiatan infiltrasi warga negara asing melalui koordinasi, komunikasi tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya, serta minimnya dukungan kebutuhan logistik wilayah bagi Satgas Pam Puter dan ketiadaan dukungan anggaran operasional yang dialokasikan dari APBD masing masing Pemda. Yang terakhir adalah sarana prasarana dan infrastruktur di Pulau Terluar yang masih terbatas baik pos pengamanan pulau terluar yang seringkali mengalami kerusakan akibat cuaca, ketiadaan dermaga dan pelabuhan, serta minimnya sarana monitoring baik berupa kamera-kamera pengawas maupun infrastruktur telekomunikasi untuk menunjang sistem kodal dan informasi. Persoalan-persoalan tersebut langsung maupun tidak langsung berpengaruh terhadap pelaksanaan Pengamanan Pulau Terluar yang belum optimal dilaksanakannya sehingga berbagai ancaman kejahatan Trans national, Infiltrasi dan Terorisme masih kerap terjadi dengan penanganan yang relatif lambat.

Oleh karena itu, mengingat bahwa pengamanan Pulau Terluar di wilayah Kodam IX/Udayana khususnya Pulau Batek dan Pulau Dana Rote merupakan kegiatan yang sangat krusial dalam mengantisipasi dan mengatasi berbagai tindakan kejahatan trans nasional yang dapat merugikan kepentingan bangsa dan negara.

Dalam skala tertentu, kejahatan trans nasional dapat berkembang pada ancaman yang dapat membahayakan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka berbagai persoalan yang dihadapi dalam pengamanan Pulau Terluar harus dapat diatasi secara menyeluruh dan terpadu oleh seluruh stake holder penyelenggara negara di Pusat maupun daerah dengan merumuskan kebijakan, strategi dan upaya untuk mengoptimalkan Pengamanan Pulau Terluar melalui meningkatkan kesiapan operasional Satgas Pam Terluar, membenahi dukungan alutsista dan materiil serta peralatan dan kelengkapan Satgas, meningkatkan sinergitas pengamanan Pulau Terluar antara unsur TNI, Kementerian/Lembaga terkait dengan Pemerintah Daerah dan instansi terkait lainnya di daerah, serta membangun sarana prasarana dan infrastruktur di Pulau Terluar. Melalui upaya-upaya tersebut diharapkan Pengamanan Pulau Terluar yang dilaksanakan dapat mengatasi ancaman kejahatan Trans National dan dapat menegakkan kedaulatan NKRI.

METODOLOGI

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan untuk menggambarkan, menjelajahi, dan menganalisis secara mendalam terkait pengamanan pulau terluar guna menghadapi ancaman kejahatan transnasional, dalam rangka menegakkan kedaulatan NKRI. Untuk mencapai tujuan tersebut, peneliti mengaplikasikan beragam metode pengumpulan data, seperti wawancara mendalam, kajian literatur, serta analisis dokumen.

Teknik wawancara mendalam akan digunakan sebagai salah satu metode utama pengumpulan data, dengan melibatkan pihak-pihak yang terlibat langsung dalam pengamanan pulau terluar, termasuk personel TNI, Bakamla, Polairud, dan pejabat pemerintah daerah. Selain itu, tinjauan literatur terhadap dokumen-dokumen kebijakan, laporan operasional, serta literatur terkait akan melengkapi data empiris dari lapangan.

Dalam penelitian ini, objek penelitian mencakup wilayah Pulau Batek dan Pulau Dana Rote, yang merupakan pulau-pulau terluar di wilayah Kodam IX/Udayana, Nusa Tenggara Timur. Kedua pulau ini memainkan peran strategis dalam menjaga kedaulatan NKRI karena berbatasan langsung dengan negara tetangga, yaitu Timor Leste dan Australia. Pengamanan Pulau Batek dan Pulau Dana Rote dilakukan melalui Satgas Pengamanan Pulau Terluar yang terdiri dari personel gabungan TNI AD dan TNI AL. Fokus penelitian ini adalah mengkaji efektivitas pengamanan yang dilaksanakan dalam menghadapi ancaman kejahatan trans nasional seperti penyelundupan narkoba, senjata api, illegal fishing, serta infiltrasi oleh negara asing melalui aktivitas asimilasi dengan penduduk setempat. Penelitian ini juga mencakup evaluasi terhadap kesiapan operasional, sinergi antarinstansi, serta ketersediaan infrastruktur dan logistik yang mendukung pengamanan pulau terluar. Melalui penelitian tesis ini, diharapkan dapat diidentifikasi permasalahan yang dihadapi serta solusi yang diperlukan untuk mengoptimalkan pengamanan pulau-pulau terluar guna menjaga kedaulatan dan integritas wilayah NKRI.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tugas Pengamanan Pulau Terluar: Pulau Batek dan Pulau Dana Rote

Perbatasan di 12 pulau terluar Indonesia memerlukan perhatian khusus, karena hingga saat ini sebagian besar penetapan batas maritim dengan negara-negara tetangga belum tuntas, terutama terkait batas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE). Meskipun beberapa batas laut wilayah dan landas kontinen sudah ditetapkan dengan beberapa negara, masih banyak persoalan yang belum selesai. Pengamanan pulau-pulau terluar Indonesia saat ini sudah berjalan dan dilaksanakan oleh pemerintah, namun masih belum cukup efektif dalam mengatasi kejahatan dan pelanggaran lintas negara di wilayah perbatasan. Salah satu tantangan utama adalah luasnya lautan dan banyaknya pulau terluar yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia, yang membuat pengawasan dan pengamanan menjadi sulit bagi pemerintah.

Di samping itu, sistem pengelolaan pulau-pulau terluar yang belum tersusun dengan baik, kesiapan Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang masih terbatas, serta kurangnya sinergi dalam perencanaan dan pelaksanaan pengamanan juga menjadi hambatan. Belum terjalinnya kerja sama militer yang optimal dengan negara-negara tetangga turut memperlambat upaya pengamanan yang efektif.

Kondisi serupa juga dialami di wilayah Nusa Tenggara Timur, khususnya pada Pulau Batek dan Pulau Dana Rote, yang memiliki posisi strategis dalam penentuan garis pangkal, ZEE, dan landas kontinen Indonesia. Meski memiliki nilai strategis, pengamanan kedua pulau ini masih menghadapi berbagai kendala, termasuk kerawanan terhadap ancaman eksternal. Pengamanan yang dilaksanakan oleh Kodam IX/Udayana juga menghadapi sejumlah masalah, yang menunjukkan bahwa pengawasan terhadap pulau-pulau terluar di wilayah ini belum optimal.

Pulau Batek dan Pulau Dana Rote merupakan pulau-pulau tidak berpenghuni yang berbatasan langsung dengan Timor Leste dan Australia. Potensi kerawanan di kedua pulau ini cukup tinggi, mengingat posisinya yang strategis dalam jalur perbatasan negara. Kodam IX/Udayana telah menerapkan pengamanan di kedua pulau tersebut sesuai dengan perintah operasi dari Panglima TNI, dengan tujuan mencegah penguasaan pulau oleh pihak asing, melindungi dari kegiatan ilegal, dan menjaga kedaulatan wilayah NKRI.

Di wilayah Kodam IX/Udayana, Pulau Batek dan Pulau Dana Rote, yang tidak berpenghuni dan memiliki dataran rendah dengan flora dan fauna terbatas, menjadi fokus utama pengamanan. Kedua pulau ini berbatasan langsung dengan Australia dan Timor Leste, sehingga memiliki kerawanan tinggi terhadap ancaman eksternal. Pengamanan terhadap Pulau Batek dan Pulau Dana Rote dilakukan oleh Kodam IX/Udayana berdasarkan peraturan dan instruksi dari Panglima TNI serta perintah operasi yang mencakup berbagai kebijakan rotasi personel untuk pengamanan pulau kecil terluar.² (IX/Udayana, Laporan pelaksanaan tugas pengamanan Pulau Terluar Kodam IX/Udayana, 2018)

² Makodam IX/Udayana, 2018. Laporan pelaksanaan tugas pengamanan Pulau Terluar Kodam IX/Udayana, Denpasar, hal-2

Tujuan pengamanan ini adalah untuk melindungi Pulau Batek dan Pulau Dana Rote dari ancaman fisik seperti abrasi atau tenggelam, mencegah penguasaan oleh negara asing, menghindari pemanfaatan pulau-pulau ini untuk aktivitas ilegal, kejahatan lintas negara, serta menjadi tempat singgah bagi teroris atau perompak. Selain itu, upaya pengamanan juga mencakup pembinaan teritorial terbatas di pulau-pulau tersebut.

Tugas pengamanan Pulau Terluar yang dilakukan oleh Kodam IX/Udayana hingga saat ini belum sepenuhnya mencapai tujuan yang diharapkan. Beberapa kendala yang dihadapi mencakup postur Satuan Tugas Pengamanan Pulau Terluar, dukungan alat utama sistem persenjataan (alutsista), perlengkapan materiil dan logistik, serta keterbatasan sarana dan prasarana yang ada di Pulau Terluar. Selain itu, koordinasi, kerja sama, dan komunikasi antar unsur TNI, kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah juga masih perlu ditingkatkan.

Postur Satgas Pengamanan Pulau Terluar di wilayah Kodam IX/Udayana melibatkan pengerahan personel dari TNI AD dan TNI AL, yang masing-masing dirotasi setiap 9 bulan. Di Pulau Batek, ditempatkan 16 personel dari Yonif 743/PSY dan 10 personel dari Yon Marinir. Sementara di Pulau Dana Rote, kekuatan terdiri dari 10 personel TNI AD dan 24 personel Marinir. Tugas Satgas meliputi pengamanan pulau, patroli di wilayah perairan sekitar, serta penindakan terhadap ancaman yang muncul, termasuk kegiatan ilegal, terorisme, dan perompakan. Meskipun begitu, kondisi geografis yang sulit serta minimnya dukungan infrastruktur menyebabkan tugas pengamanan ini belum optimal.

Alutsista dan Perlengkapan Materiil yang digunakan dalam pengamanan juga masih terbatas. Sarana prasarana pengendalian operasi (Kodal) yang ada di wilayah Kodam IX/Udayana belum sepenuhnya terintegrasi, dan sistem komunikasi berbasis satelit yang dibutuhkan belum memadai. Selain itu, beberapa peralatan seperti perahu karet, kendaraan roda dua, dan alat komunikasi yang dibutuhkan dalam operasional masih kurang memadai. Kondisi geografis dan cuaca yang ekstrem di Pulau Terluar juga mengakibatkan kerusakan cepat pada materiil dan peralatan yang digunakan oleh Satgas.

Koordinasi dan Kerja Sama antara TNI, kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dalam pengelolaan Pulau Terluar masih perlu ditingkatkan. Pengamanan Pulau Terluar memerlukan sinergi lintas sektor untuk menghadapi berbagai ancaman, namun hingga saat ini koordinasi antar instansi sering kali berjalan secara sektoral. Kurangnya dukungan pemerintah daerah dalam hal penyediaan infrastruktur juga menjadi hambatan dalam optimalisasi pengamanan Pulau Terluar.

Fasilitas yang ada di Pulau Batek saat ini mencakup 1 unit rambu suar, 1 unit tugu prasasti AMD, 1 bangunan milik Dinas Kimpraswil, serta beberapa bangunan lainnya seperti kantor staf, barak pasukan, bak air, dapur, kamar mandi, helipad, dan patung Jenderal Sudirman. Namun, sarana dan prasarana tersebut masih sangat terbatas, baik untuk tujuan pengembangan potensi pulau maupun dalam mendukung upaya pengamanan secara keseluruhan.

Kendala logistik juga diperparah oleh minimnya sarana transportasi laut, yang sangat penting untuk mendukung pelaksanaan patroli serta evakuasi. Keterbatasan

infrastruktur ini mencakup kurangnya dermaga, pelabuhan, dan sistem komunikasi yang diperlukan untuk mengendalikan operasi keamanan di pulau-pulau tersebut. Hal ini menyebabkan proses pengiriman logistik seringkali terhambat oleh kondisi cuaca yang ekstrem dan jarak tempuh yang jauh.

Selain itu, infrastruktur di pos-pos pengamanan, termasuk mercusuar, sensor deteksi, dan jaringan telekomunikasi, masih sangat terbatas. Padahal, infrastruktur yang memadai sangat dibutuhkan untuk memonitor aktivitas ilegal di sekitar wilayah perbatasan. Kurangnya fasilitas pendukung di pos pengamanan berpengaruh pada efektivitas tugas Satgas dalam menjaga pulau-pulau terluar dari ancaman kejahatan trans nasional.

Dalam upaya menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), khususnya di wilayah perbatasan yang melibatkan pulau-pulau terluar, berbagai tantangan logistik dan infrastruktur menjadi hambatan signifikan dalam pelaksanaan tugas pengamanan. Pulau-pulau terluar Indonesia, seperti Pulau Batek dan Pulau Dana Rote, menghadapi kondisi geografis yang sulit diakses dan sering kali kekurangan fasilitas dasar yang mendukung pelaksanaan pengamanan. Kondisi ini menghambat efektivitas operasional Satuan Tugas Pengamanan (Satgas Pam) Pulau Terluar yang bertugas di wilayah tersebut.

Keterbatasan logistik dan infrastruktur tidak hanya berdampak pada kesiapan operasional, tetapi juga pada dukungan alutsista, materiil, serta kelengkapan yang dibutuhkan untuk mendukung tugas pengamanan. Lebih lanjut, sinergi antarinstansi seperti TNI, kementerian, dan pemerintah daerah yang seharusnya berperan penting dalam pengamanan ini belum sepenuhnya terwujud. Hal ini menyebabkan Satgas Pam Pulau Terluar bekerja dalam kondisi serba terbatas, terutama dalam hal sarana dan prasarana, seperti pos pengamanan, dermaga, mercusuar, dan sistem komunikasi yang sangat dibutuhkan.

Untuk lebih memahami tantangan ini, berikut adalah rincian beberapa hambatan utama yang dihadapi dalam aspek logistik dan infrastruktur:

- a. **Terbatasnya kesiapan operasional Pengamanan Pulau Terluar.** Kesiapan operasional Pengamanan Pulau Terluar masih terbatas, karena gelar kekuatan Satgas Pengamanan Pulau Terluar khususnya di Pulau Batek dan NdanaRote belum memadai/ minim baik dari unsur TNI AD, TNI AL maupun TNI AU.
- b. **Terbatasnya dukungan alutsista dan materiil serta peralatan dan kelengkapan pengamanan Pulau Terluar.** Dukungan alutsista, materiil serta peralatan dan perlengkapan yang dimiliki oleh Satgas Pam Pulau Terluar di wilayah Kodam IX/Udayana masih belum sepenuhnya dapat didukung, dengan kondisi yang minim dan banyak mengalami kerusakan. Sementara dukungan dari Komando atas masih terbatas.
- c. **Belum terwujudnya sinergitas pengamanan Pulau Terluar antara unsur TNI dengan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.** Sinergitas pengamanan Pulau Terluar antara unsur TNI dengan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah seperti unsur BNPP, Kementerian PUPR, Dinas Imigrasi dan Kepabeanan masih belum terwujud, dengan masih dominannya

TNI dalam melaksanakan tugas pengamanan serta minimnya dukungan yang diberikan oleh unsur Kementerian/Lembaga dan Pemerintah daerah dalam operasionalisasi Satgas Pam Pulau Terluar.

- d. **Terbatasnya sarana prasarana dan infrastruktur di Pulau Terluar.** Sarana prasarana dan infrastruktur berupa Pos Satgas Pengamanan, Pelabuhan, dermaga, mercusuar, jaringan telekomunikasi, sensor deteksi yang ada di Pulau Terluar Pulau Batek dan Pulau Ndana Rote masih sangat terbatas, sehingga Satgas Pengamanan Pulau melaksanakan pengamanan Pulau terluar dengan serba keterbatasan.

Kondisi pengamanan pulau terluar saat ini di wilayah Kodam IX/Udayana dalam menghadapi ancaman kejahatan transnasional

Narasumber A menekankan bahwa kesiapan personel dan infrastruktur di pulau-pulau terluar Kodam IX/Udayana masih mengalami kendala besar. Kurangnya koordinasi lintas instansi menyebabkan respons terhadap ancaman transnasional seperti penyelundupan dan infiltrasi asing berjalan lambat. Teori Kesiapan menegaskan pentingnya kesiapan personel dan dukungan infrastruktur sebagai fondasi untuk melawan ancaman tersebut. Kemudian, Narasumber B menjelaskan bahwa ancaman di perairan sekitar Kodam IX/Udayana semakin kompleks, dengan seringnya terjadi penyelundupan senjata, narkoba, dan illegal fishing. Keterbatasan alutsista, khususnya kapal patroli dan radar pengawasan, memperlambat respons terhadap ancaman ini. Teori Modernisasi menyoroti pentingnya modernisasi peralatan militer untuk meningkatkan efektivitas pengamanan. Penelitian Marsetio (2013) mendukung pandangan ini dengan menekankan pentingnya modernisasi alutsista TNI Angkatan Laut, terutama untuk mengelola 92 pulau kecil terluar yang berpotensi mengalami konflik. Modernisasi radar dan kapal patroli di wilayah perbatasan laut dapat memperkuat pengamanan dan respons yang lebih cepat terhadap ancaman transnasional.

Narasumber C mencatat bahwa koordinasi antara TNI, Bakamla, Polairud, dan pemerintah daerah masih terfragmentasi, menyebabkan tumpang tindih dalam upaya pengamanan. Teori Sinergi berpendapat bahwa efektivitas pengamanan di pulau-pulau terluar membutuhkan sinergi yang kuat antara lembaga militer dan sipil. Penelitian Alberto Sahat Parulian Nainggolan, Budi Setyoko, dan Marihot (2021) menyatakan bahwa optimalisasi peran Satgas TNI dan peningkatan sinergi lintas lembaga adalah kunci dalam menjaga kedaulatan di pulau-pulau terluar Indonesia. Kendala komando dan pengendalian (kodal) yang disorot dalam penelitian tersebut juga muncul dalam wawancara ini, yang menunjukkan bahwa peningkatan sinergi lintas instansi adalah langkah krusial dalam pengamanan wilayah perbatasan.

Narasumber D mengungkapkan bahwa kendala logistik adalah tantangan terbesar dalam pengamanan pulau-pulau terluar. Ketersediaan pos penjagaan, alat komunikasi, dan sarana transportasi yang memadai sangat minim, yang menghambat kesiapan operasional satuan. Teori Pembangunan menekankan pentingnya pembangunan infrastruktur untuk mendukung operasional militer di wilayah strategis. Hal ini juga disorot dalam penelitian Purwanto Adi Nugroho (2024) yang menegaskan perlunya kebijakan pertahanan yang lebih strategis dan terkoordinasi di

wilayah perbatasan strategis seperti Natuna untuk mengantisipasi eskalasi konflik di Laut China Selatan. Dengan pembangunan infrastruktur yang memadai, kesiapan satuan TNI di pulau-pulau terluar dapat lebih optimal.

Narasumber E mengungkapkan bahwa minimnya integrasi sistem komunikasi antar satuan di pulau terluar mengakibatkan lambatnya koordinasi dalam menghadapi ancaman transnasional. Teori Modernisasi menekankan pentingnya sistem komunikasi yang modern dan real-time untuk mendukung operasi militer. Penelitian Yuwono Prianto dan Hery Firmansyah (2016) juga menunjukkan pentingnya pengelolaan perbatasan yang efektif, termasuk peningkatan infrastruktur komunikasi untuk memastikan respons cepat terhadap ancaman lintas negara. Dengan modernisasi sistem komunikasi, pengawasan dan pengendalian di wilayah perbatasan dapat lebih efisien dan responsif.

Narasumber F mencatat bahwa keterbatasan fasilitas transportasi dan patroli laut menghambat mobilitas pasukan serta pengiriman logistik ke pos-pos pengamanan di pulau terluar. Teori Sinergi menggarisbawahi pentingnya kerjasama lintas lembaga dalam menangani masalah logistik ini. Sinergi antara TNI dan lembaga terkait dapat memfasilitasi mobilisasi yang lebih cepat dan responsif terhadap ancaman. Penelitian Nainggolan et al. (2021) juga menekankan pentingnya optimalisasi logistik dan patroli laut untuk meningkatkan efektivitas pengamanan pulau-pulau terluar.

Narasumber G menekankan bahwa alutsista yang digunakan di pulau terluar masih usang dan tidak efektif dalam menghadapi ancaman modern. Teori Modernisasi menggarisbawahi pentingnya pembaruan peralatan militer untuk mendukung kesiapan pertahanan negara. Penelitian Marsetio (2013) mendukung pentingnya modernisasi alutsista, terutama untuk menjaga kedaulatan di wilayah perbatasan yang memiliki potensi konflik tinggi. Dengan pembaruan alutsista, TNI dapat lebih siap menghadapi ancaman kejahatan transnasional yang semakin kompleks.

Narasumber H menyoroti pentingnya peningkatan pelatihan personel, terutama dalam menghadapi ancaman transnasional yang lebih kompleks. Teori Kesiapan menekankan bahwa personel harus dilatih secara intensif dan spesifik untuk menghadapi ancaman seperti terorisme dan infiltrasi asing. Penelitian Nainggolan et al. (2021) juga menunjukkan bahwa pemberdayaan SDM melalui pelatihan intensif adalah kunci untuk meningkatkan efektivitas pengamanan di pulau-pulau terluar.

Narasumber I menyoroti pentingnya kerjasama lintas lembaga dalam menjaga keamanan di pulau terluar. Teori Sinergi menekankan pentingnya koordinasi antar lembaga militer dan sipil untuk menjaga efektivitas pengamanan. Penelitian Gustria Ningsih et al. (2023) juga menunjukkan bahwa sinergi antara TNI dan pemerintah daerah sangat diperlukan dalam menjaga stabilitas keamanan di wilayah perbatasan. Tanpa sinergi yang kuat, operasi pengamanan akan tetap berjalan sektoral dan kurang efektif dalam menghadapi ancaman transnasional.

Strategi Yang Tepat Dalam Mengoptimalkan Pengamanan Pulau Terluar Guna Mengatasi Ancaman Kejahatan Transnasional

Narasumber A menyoroti kurangnya sinergi lintas lembaga sebagai kendala utama dalam menghadapi kejahatan transnasional di pulau-pulau terluar. Berdasarkan *Teori Sinergi*, kekuatan pertahanan tidak dapat berjalan optimal tanpa adanya koordinasi yang baik antar lembaga terkait, seperti TNI, Polri, Kementerian Pertahanan, dan pemerintah daerah. Hal ini menunjukkan bahwa kurangnya sinergi antar lembaga menyebabkan lambatnya respons terhadap ancaman seperti penyelundupan dan infiltrasi asing. Sebagai solusi, mereka merekomendasikan penguatan kerjasama antarinstitusi dan peningkatan komunikasi antara pusat dan daerah agar pengamanan bisa lebih cepat dan terkoordinasi dengan baik. Selain itu, modernisasi alutsista yang dikaitkan dengan *Teori Modernisasi* juga diusulkan sebagai bagian penting dalam strategi pengamanan, mengingat banyak peralatan yang digunakan sudah usang.

Narasumber B memaparkan bahwa tantangan utama dalam pengamanan wilayah laut di sekitar pulau terluar adalah minimnya teknologi deteksi dini dan kapal patroli yang memadai. Berdasarkan *Teori Kesiapan*, efektivitas pertahanan ditentukan oleh seberapa siapnya satuan dalam merespons ancaman, yang dalam hal ini masih terbatas. Penelitian Marsetio (2013) juga menyoroti pentingnya modernisasi kekuatan laut Indonesia untuk menghadapi ancaman maritim yang semakin kompleks, yang sejalan dengan temuan Wiltas Laut Ditwilhan Strahan Kemhan. Untuk memperkuat kesiapan, Wiltas Laut Ditwilhan Strahan Kemhan merekomendasikan peningkatan patroli laut dan modernisasi teknologi radar serta komunikasi maritim. Ini sejalan dengan *Teori Modernisasi*, yang menyatakan bahwa penguatan infrastruktur teknologi akan meningkatkan respons terhadap ancaman yang berkembang di wilayah perairan perbatasan.

Narasumber C menyebutkan bahwa kendala utama dalam pengamanan pulau terluar adalah minimnya keterlibatan pemerintah daerah dan kurangnya sinergi antar lembaga. Berdasarkan *Teori Sinergi*, integrasi antara lembaga pemerintah dan TNI sangat diperlukan untuk menciptakan pengamanan yang efektif. Hal ini juga ditemukan dalam penelitian Alberto Sahat Parulian Nainggolan et al. (2021), yang menekankan pentingnya sinergi dan optimalisasi peran Satgas TNI dalam pengamanan pulau terluar. Narasumber C juga menekankan bahwa kurangnya koordinasi antar lembaga, baik di tingkat pusat maupun daerah, menjadi kendala besar dalam menangani ancaman seperti penyelundupan dan perdagangan manusia. Mereka menyarankan adanya regulasi yang lebih jelas dalam pembagian tanggung jawab, serta peningkatan kapasitas personel yang berfokus pada pemanfaatan teknologi modern untuk memperkuat deteksi dan penindakan.

Narasumber D menyoroti keterbatasan logistik dan infrastruktur sebagai faktor yang mempengaruhi kesiapan operasional di pulau-pulau terluar. Berdasarkan *Teori Kesiapan*, kondisi ini membuat satuan di lapangan tidak mampu merespons ancaman dengan cepat. Penelitian Nugroho (2024) juga menemukan bahwa penguatan infrastruktur di kawasan strategis seperti Natuna sangat penting untuk menghadapi ancaman dari Laut China Selatan, yang relevan dengan kondisi di wilayah Kodam IX/Udayana. Narasumber D merekomendasikan peningkatan kapasitas infrastruktur,

baik dalam bentuk pos penjagaan yang lebih baik, alutsista modern, maupun logistik yang memadai. Peningkatan pelatihan juga menjadi fokus mereka untuk memperkuat kesiapan satuan dalam menghadapi ancaman kejahatan lintas negara, yang sejalan dengan *Teori Pembangunan* yang mendukung pembangunan sumber daya manusia melalui pelatihan dan pendidikan berkelanjutan.

Narasumber E mengungkapkan bahwa kurangnya infrastruktur komunikasi menjadi kendala besar dalam operasi pengamanan di pulau-pulau terluar. Berdasarkan *Teori Kesiapan*, tanpa sistem komunikasi yang memadai, satuan pengamanan akan mengalami kesulitan dalam mengoordinasikan respons terhadap ancaman. Ini juga diperkuat oleh hasil penelitian Yuwono Prianto dan Hery Firmansyah (2016) yang menyoroti pentingnya modernisasi infrastruktur di daerah perbatasan. Sebagai solusi, Narasumber E merekomendasikan peningkatan investasi dalam teknologi komunikasi modern, seperti sistem satelit, untuk mendukung operasi real-time. Mereka juga menekankan pentingnya integrasi komunikasi antar matra TNI untuk memperkuat respons operasional di lapangan. Menurut Narasumber E, tantangan logistik masih menjadi penghalang utama dalam menjaga keamanan di pulau terluar. Berdasarkan *Teori Pembangunan*, perencanaan logistik yang lebih baik dan sistem distribusi yang efisien diperlukan untuk mendukung operasi militer di daerah terpencil. Kondisi ini juga diperkuat oleh penelitian Nainggolan et al. (2021), yang menekankan pentingnya logistik dan dukungan operasional dalam menjaga kedaulatan wilayah terluar. Narasumber E merekomendasikan pengadaan kapal angkut dan peralatan logistik yang lebih efisien, serta kerjasama dengan sektor swasta untuk mempercepat distribusi logistik di daerah perbatasan.

Narasumber F menggarisbawahi perlunya modernisasi alutsista dalam menghadapi ancaman transnasional di wilayah perbatasan. Berdasarkan *Teori Modernisasi*, peningkatan kekuatan pertahanan harus didukung oleh teknologi dan peralatan yang canggih. Hal ini sejalan dengan temuan Marsetio (2013), yang menyatakan bahwa modernisasi alutsista sangat penting dalam menjaga kedaulatan maritim Indonesia. Narasumber F merekomendasikan pembaruan alutsista, seperti kapal patroli berteknologi tinggi dan radar modern, untuk meningkatkan deteksi dini dan pengawasan perbatasan. Mereka juga menekankan pentingnya pengembangan teknologi drone untuk memperkuat pengawasan di wilayah strategis.

Narasumber H menekankan pentingnya pelatihan intensif bagi personel yang bertugas di pulau-pulau terluar. Berdasarkan *Teori Pembangunan*, pelatihan yang berkelanjutan dan berbasis skenario ancaman yang realistis sangat penting untuk meningkatkan kesiapan operasional. Ini sejalan dengan penelitian Nainggolan et al. (2021), yang menekankan pentingnya pemberdayaan SDM dalam meningkatkan efektivitas pengamanan pulau terluar. Narasumber H merekomendasikan peningkatan frekuensi latihan gabungan yang melibatkan seluruh matra TNI, dengan fokus pada simulasi ancaman yang lebih kompleks. Selain itu, evaluasi berkala terhadap kesiapan personel juga diperlukan untuk memastikan efektivitas pengamanan.

Narasumber I menyoroti pentingnya sinergi antar lembaga sebagai kunci dalam mengoptimalkan pengamanan di pulau terluar. Berdasarkan *Teori Sinergi*, pengamanan yang efektif hanya dapat tercapai jika ada integrasi yang baik antara TNI

dan lembaga terkait. Temuan ini juga diperkuat oleh penelitian Gustria Ningsih et al. (2023), yang menekankan pentingnya sinergi antara TNI dan pemerintah daerah dalam menjaga keamanan wilayah perbatasan. Mereka menyadari bahwa terdapat tantangan terbesar adalah ego sektoral antara lembaga yang menyebabkan kurangnya koordinasi dan sinergi operasional di lapangan. Oleh karena itu, Narasumber I merekomendasikan pembentukan pusat koordinasi khusus yang melibatkan semua pihak terkait, baik dari TNI, kementerian terkait, hingga pemerintah daerah. Pusat ini berfungsi sebagai titik koordinasi untuk pengawasan, pertukaran informasi, dan tindakan operasional dalam menghadapi ancaman kejahatan transnasional di wilayah perbatasan. Narasumber I juga menyarankan latihan gabungan berkala antara TNI dan instansi terkait seperti Bakamla dan Polairud, untuk memastikan kesiapan operasional di seluruh lini, termasuk dalam hal komunikasi, logistik, dan penggunaan teknologi pengawasan. Sinergi ini diharapkan mampu menutup celah yang selama ini dimanfaatkan oleh kejahatan lintas negara, seperti penyelundupan dan infiltrasi asing, serta memastikan keamanan yang lebih kuat di perbatasan Indonesia.

SIMPULAN

Saat ini, pengamanan yang dilakukan melalui Satuan Tugas Pengamanan Pulau Terluar (Satgas Pamputer) masih dihadapkan pada berbagai kendala, termasuk minimnya dukungan alutsista dan infrastruktur, yang menghambat operasional di lapangan. Keterbatasan komunikasi dan logistik memperburuk koordinasi antara satuan TNI serta dengan lembaga terkait seperti BNPP dan pemerintah daerah. Koordinasi lintas sektor masih berjalan sektoral dan belum optimal, sehingga respons terhadap ancaman sering kali lambat dan kurang terkoordinasi.

Dukungan teknologi, seperti sistem komunikasi berbasis satelit, sangat diperlukan untuk memperkuat koordinasi di lapangan. Namun, hingga saat ini integrasi teknologi ini belum tercapai secara maksimal. Tantangan geografis dan cuaca ekstrem di wilayah pulau terluar juga menjadi faktor yang mengakibatkan kerusakan cepat pada peralatan dan alutsista yang digunakan oleh Satgas, sehingga kemampuan respons terhadap ancaman menjadi lebih lambat dan tidak efisien.

Dari hasil wawancara dengan berbagai narasumber terkait, tampak jelas bahwa meskipun ada upaya untuk meningkatkan pengamanan, masih banyak aspek yang perlu diperbaiki. Penggelaran personel TNI sudah memadai dalam hal jumlah dan pelatihan, tetapi dukungan logistik, sarana komunikasi, dan infrastruktur harus ditingkatkan agar pengamanan di wilayah strategis ini dapat berjalan lebih optimal dalam menghadapi dinamika ancaman kejahatan transnasional.

Pengamanan pulau terluar di wilayah Kodam IX/Udayana merupakan prioritas strategis dalam menjaga integritas dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Ancaman kejahatan transnasional, seperti penyelundupan narkoba, senjata, illegal fishing, serta infiltrasi asing, memerlukan pendekatan keamanan yang terkoordinasi dan berkelanjutan, strategi yang paling efektif untuk mengoptimalkan pengamanan pulau-pulau ini meliputi beberapa aspek penting, yaitu:

- a. **Peningkatan Kesiapan Operasional:** Pelatihan personel dan kesiapan

operasional yang berfokus pada simulasi ancaman modern menjadi hal krusial. Latihan gabungan antar matra TNI (AD, AL, AU) serta dengan lembaga lain seperti Bakamla dan Polri harus ditingkatkan untuk menghadapi potensi ancaman lintas negara .

- b. **Modernisasi Alutsista dan Teknologi:** Keberhasilan pengamanan juga sangat bergantung pada modernisasi alat utama sistem persenjataan (alutsista) dan integrasi teknologi canggih, seperti radar maritim, sistem pemantauan berbasis satelit, dan drone untuk deteksi dini . Tanpa modernisasi alutsista dan teknologi ini, pengawasan terhadap wilayah perbatasan akan sulit dilakukan dengan efektif.
- c. **Koordinasi dan Sinergi Antarinstansi:** Pengamanan pulau terluar tidak dapat dilakukan hanya oleh satu institusi. Sinergi antara TNI, lembaga pemerintah, dan pemerintah daerah sangat diperlukan. Keberhasilan dalam menjaga keamanan pulau terluar sangat bergantung pada koordinasi yang baik antar instansi terkait, termasuk dalam hal pengawasan dan penegakan hukum .
- d. **Pemberdayaan Infrastruktur dan Logistik:** Pulau terluar sering kali memiliki kondisi geografis yang ekstrem, sehingga pembangunan infrastruktur dan peningkatan dukungan logistik menjadi prioritas. Pos pengamanan yang memadai, transportasi laut untuk patroli, serta sistem komunikasi yang lebih baik harus disediakan untuk mendukung operasi keamanan di wilayah ini .

Secara keseluruhan, strategi yang diusulkan mencakup peningkatan kesiapan operasional, modernisasi alutsista, penguatan sinergi antar instansi, serta pembangunan infrastruktur dan logistik. Dengan pendekatan yang komprehensif ini, diharapkan pengamanan pulau terluar dapat lebih efektif dalam menghadapi ancaman kejahatan transnasional, menjaga kedaulatan NKRI, dan melindungi stabilitas nasional di wilayah perbatasan .

Referensi :

- Achmad Dwi Afriyadi. (2018). Menuju Pulau Paling Selatan RI yang Kini “Melek” Sinyal. Detik Finance: Jakarta. <https://finance.detik.com/infras>
- Afandi, S. A., & Pribadi, U. (2019). The Capability of the Riau Malay Customary Institution (LAM) in realizing the Riau 2020 Vision. *Masyarakat, Kebudayaan Dan Politik*, 32(2), 196. <https://doi.org/10.20473/mkp.v32i22019.196-208>
- Alwasilah, A. Chaedar. (2012). Pokoknya kualitatif. Bandung: PT. Dunia Pustaka Jaya.
- Amandemen UUD Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 25 A(Yogyakarta : Buku Pintar, 2014) Hal.33
- Arikunto, S. (2004). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta
- B. Christensen, Larry, et.all., *Research Methods, Design, and Analysis*, Boston: Pearson Education, 2011.
- Creswell, John W. 2017. *Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif dan Campuran*. Yogya: Pustaka Pelajar

- Covey, S. R. 1993. *Principles Centered Leadership*. Franklin: Covey Co
- Dedi Susanto, Risnita, M.Syahrani Jailani, Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Dalam Penelitian Ilmiah, QOSIM: Jurnal Pendidikan, Sosial & Humaniora, Volume 1 Nomor 1 Mei 2023
- E. Mulyasa. 2008. *Menjadi Guru Profesional Menciptakan Pembelajaran Kreatif dan Menyenangkan*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
- Joenil Kahar, " Penyelesaian Batas Maritim NKRI" dalam Pikiran Rakyat Cyber Media tanggal 3 Januari 2004, hlm 1.
- Lemhannas RI, Modul tentang "Implementasi Konsep Ketahanan Nasional dalam Pembangunan", Jakarta, 01 Mei, 2016.
- Mabes TNI. (2011). *Buku Petunjuk Pelaksanaan TNI mengenai Operasi Pengamanan Pulau-pulau Kecil Terluar di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia*. Hal 3-4
- Makodam IX/Udayana. (2019). *Laporan Evaluasi Pelaksanaan Operasi Pengamanan Pulau Kecil Terluar Triwulan I Ta 2019 Kodam IX/Udayana (Periode 1 Januari Sd 31 Maret 2019)*. Denpasar, Hal-5
- Makodam IX/Udayana, 2018. *Laporan pelaksanaan tugas pengamanan Pulau Terluar Kodam IX/Udayana*, Denpasar, hal-2
- Nasucha, Yakub, Muhammad Rohmadi, dan Agus Budi Wahyudi. 2014. *Bahasa Indonesia*. Yogyakarta: Media Perkasa.
- Nurcholish Madjid, *Islam Kemodernan, dan Keindonesiaan* (Bandung: Mizan, 1997), hal 172
- Pemri. (2017). *Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2017 tentang Penetapan Pulau-Pulau Kecil Terluar*, Jakarta, hal-1
- Peraturan Pemerintah RI No. 38 Tahun 2002 tentang *Daftar Koordinat Geografis Titik-titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia*, belum disosialisasikan kepada masyarakat internasional, serta memerlukan revisi pasca lepasnya Pulau Sipadan dan Ligitan.
- Pokja Bidang Studi Geografi. "Materi Pokok Bidang Studi Geografi ". Jakarta. Lemhannas RI. 2016
- Sudijono, Anas. 2011. *Evaluasi Pendidikan*. Jakarta; Raja Grafindo Persada.
- Slameto (2010). *Belajar dan Faktor yang mempengaruhinya*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Stoner, James. (2010). *Manajemen*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Wilbert E. Moore, "Social Verandering" dalam *Social Change*, diterjemahkan oleh A. Basoski, Prisma Boeken, Utrech, Antwerpen, 1965 hlm 129
- Yamin, M., & Haryanto, A. (2017). *Teori Pembangunan Internasional*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu.